

## Purworejo Siap Gelar Pilkada

**PURWOREJO (KR)** - Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM menyatakan bahwa Kabupaten Purworejo siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan digelar secara serentak 9 Desember 2020, bersama Pilkada di sembilan provinsi dan 270 kabupaten/kota lainnya se Indonesia. "Purworejo siap mendukung KPU dan penyelenggaraan Pemilu lainnya untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, katanya, Sabtu (4/7). Usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar melalui video conference (vicon), Agus Bastian di Command Center Purworejo menambahkan, jika nantinya alokasi anggaran akan menyesuaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika belum mencukupi, Pemkab Purworejo siap membantu melalui optimisasi sarana dan prasarana yang ada.

"Kami siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak ini, tandasnya didampingi Sekda Drs Said Romadhon, Ketua KPU Drs Dulrohman beserta komisioner KPU, Ketua Bawaslu Nur Kholiq SH SThl MKn, Kabag Pemerintahan Sri Setyowati SH MM serta Kabag Humas dan Protokol Rita Purnama SSTP MM. Dalam vicon itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Kamavian menjelaskan hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 27 Mei 2020 bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah menyepakati pemungutan suara Pilkada serentak untuk digelar 9 Desember 2020. Alasan Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020 karena tidak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 di tanah air. (Nar)-o

## Abaikan Protokol Kesehatan Dihukum

**SALATIGA (KR)** - Warga Salatiga harus siap menerima hukuman apabila mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Hukuman tersebut antara lain menyapu jalan dan sanksi administrasi, menyusul telah resmi diundangkannya Peraturan Walikota (Perwali) tentang penerapan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 Nomor 17 Tahun 2020.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomin) Pemkot Salatiga Rahadi Widya Prasetya, Sabtu (4/7) mengatakan dalam Perwali itu mengatur salah satunya hukuman bagi warga yang tidak menaati protokol Covid-19. "Warga yang tidak memakai masker saat ke luar rumah akan dihukum menyapu jalan raya serta teguran lisan maupun tertulis yang ada konsekuensinya," ujar Rahadi Widya Prasetya. Perwali tersebut sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sampai status tanggap darurat Covid-19 dicabut. (Sus)-o

## Gowes Sambil Wisata di Candi Prambanan

**KLATEN (KR)** - Beberapa kelompok pesepeda di Kabupaten Klaten, Sabtu (4/7) menyelenggarakan gowes dari Klaten, menuju kompleks Candi Prambanan. Kegiatan tersebut sebagai perwujudan agar badan sehat dan fit selama masa pandemi Covid-19 yang kini masih belum berakhir. Rombongan dikawal beberapa anggota Polres Klaten dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hemenang SKom. Sampai di garis finish Candi Prambanan langsung istirahat. Sementara peserta memanfaatkan keindahan Candi Prambanan dengan foto berbagai gaya dengan sepedanya. Semua peserta harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan jaga jarak. (Isw)-o



KR-Iswantoro

**Peserta gowes dari Klaten berfoto berlatar belakang Candi Prambanan.**

## SMK TKM Purworejo Siapkan Protokoler KBM

**PURWOREJO (KR)** - Mayoritas orang tua atau wali siswa menghendaki agar kegiatan belajar dan mengajar (KBM) kembali dibuka dan dilaksanakan secara langsung atau offline. Meskipun dalam kegiatan sekolah ini ada pembatasan sesuai protokoler Covid-19. "Kami memberikan dua opsi kepada para wali siswa dan siswa menjelang tahun ajaran baru yang akan kami laksanakan mulai minggu depan (Senin 13/7), kata Kepala SMK Taman Karya Madya (TKM) Tamansiswa Kabupaten Purworejo Ki Gandung Ngadina SPd MPd, Sabtu (4/7). Dua opsi itu kata Ki Gandung Ngadina yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekoah (MKKS) SMK Purworejo ini, kegiatan KBM dilakukan secara online, yang berarti para siswa belajar di rumah masing-masing seperti yang dilakukan selama pandemi ini, dan KBM secara offline, dimana terjadi tatap muka antara guru dengan siswa di sekolah. (Nar)-o



KR-Gunarwan

**SMK TKM menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan sekolah.**

## DPRD dan Pemkab Grobogan Setujui Raperda Pelaksanaan APBD 2019



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

**GROBOGAN (KR)** - DPRD bersama Pemkab Grobogan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan tahun anggaran 2019. Persetujuan dituangkan dalam naskah berita acara persetujuan bersama yang ditandatangani Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM dengan Ketua DPRD Agus Siswanto SSos, Wakil Ketua DPRD Ir HM Nurwibowo MSI, H Sugeng Prasetyo SE MM dan H M Fatah SPdl, dalam rapat Paripurna DPRD Grobogan, Kamis (2/7).

Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM mengucapkan terima kasih kepada

seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah membahas dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. "Dengan disetujuinya Raperda tersebut, maka saya juga dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 sebagaimana hasil pembahasan," tegasnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 305 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Raperda Kabupaten Grobogan tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk dievaluasi. Selanjutnya Gubernur Jateng akan menyampaikan hasil evaluasi kepada bupati paling lama lima belas hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Menurut Sri Sumarni, tujuan dari evaluasi gubernur adalah untuk melihat apakah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi

Gubernur paling lama tujuh hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut.

Sehingga diharapkan Raperda Kabupaten Grobogan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada

minggu ke empat bulan Juli 2020.

Sebelumnya, bupati melaporkan, pelaksanaan APBD 2019, pendapatan yang dicapai terealisasi Rp 2,5 triliun lebih atau mencapai 99,27% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2,6 triliun. (Tas)-o



KR-M Taslim

**Penandatanganan keputusan dan persetujuan bersama atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2019.**

## New Habit, Adaptasi Kebiasaan Baru Cegah Penularan Covid-19

**PURWOREJO (KR)** - Sudah tiga minggu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mencabut masa tanggap darurat Covid-19 dan menggantinya dengan adaptasi kebiasaan baru (New Habit).



Sosialisasi dan upaya penegakan aturan demi meniadakan masyarakat tentang pentingnya usaha pencegahan virus, terus dilakukan.

Namun, menyadarkan masyarakat agar mau menerapkan protokol kesehatan, bukan perkara mudah. Masih banyak ditemui warga yang mengabaikan protokol. Seperti ketika penertiban dilakukan tim gabungan

Pemkab Purworejo di Alun-alun kota beberapa hari lalu, ratusan warga terjaring tidak mengenakan masker. Mereka dihukum *push up* dan menghafal Pancasila.

Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM mengatakan, pemerintah tidak pernah berhenti mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan hidup baru agar tidak tertular Covid-19.

"Masyarakat harus sadar bahwa virus Korona itu akan selalu ada di sekitar kita, maka tidak ada cara lain untuk mencegah penularan selain menerapkan *New Habit*," tuturnya, Minggu (5/7). Menurutnya, pemkab memutuskan memilih istilah *New Habit* untuk memudahkan sosialisasi kepada ma-

sarakat. Istilah kebiasaan baru mengingatkan masyarakat bahwa virus tersebut masih ada.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap pencabutan masa tanggap darurat berarti kemenangan atas Covid-19 dan kehidupan kembali normal seperti sebelum ada pandemi.

Bentuk adaptasi yang harus dilaksanakan masyarakat antara lain selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak antarindividu, dan rutin cuci tangan pakai sabun.

Bupati juga mengingatkan masyarakat yang kondisinya sakit untuk segera berobat dan tidak keluar rumah dahulu.

"Tempat publik sudah

dibuka dan geliat ekonomi mulai normal, namun bukan berarti warga bebas semaunya beraktivitas dengan mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat wajib menjaga diri, tetap lakukan upaya pencegahan sehingga tidak ada kasus penularan lagi di Purworejo," ungkapnya. Beberapa minggu terakhir, tidak ditemukan lagi tambahan kasus baru

Covid-19. Sepanjang terjadinya pandemi hingga Jumat (3/7), kasus positif terkonfirmasi sebanyak 81.

Sebanyak 69 dinyatakan sembuh, dan 12 menjalani rawat jalan dengan isolasi mandiri di rumah. Tidak ada pasien meninggal dunia. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga tidak mengalami penambahan. (Jas)-o



KR-Jarot Sarwosambodo

**Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM.**



KR-Jarot Sarwosambodo

**Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH.**

## Kejari Gelar Bimtek Jaga dan Kawal Dana Desa

**MAGELANG (KR)** - Kejaksaa Negeri Kabupaten Magelang merespons baik dan mendukung pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi jaga dan kawal dana desa. Hal tersebut merujuk pada peraturan Desa No 11 Tahun 2009 tentang penekanan pada sistem dana desa secara digital.

Kepala Kejaksaa Negeri Kabupaten Magelang, Edi Irsan Kurniawan mengatakan, melalui sistem dana desa secara digital akan memiliki konsekuensi membuka ruang yang lebar untuk keterbukaan, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan dana desa tersebut bisa diketahui oleh publik.

"Dengan demikian, diharapkan ada pengawasan dari publik. Dan tentunya juga sangat bermanfaat bagi para atasan kepala desa yang ada dalam otoritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, dan juga bagi kami (Kejaksaa Negeri Kabupaten Magelang) sebagai aparat penegak hukum," kata, Edi Irsan Kurniawan saat bimtek aplikasi jaga dan kawal dana desa di Rumah Dinas Bupati Magelang, Jumat (3/7) kemarin.

Selain itu, sebagai aparat penegak hukum Kejaksaa Negeri juga memiliki fungsi untuk mencegah secara dini ke-

bocoran-kebocoran pengelolaan dana desa. Melalui kegiatan bimtek tersebut yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Pemkab Magelang beserta para camat bisa benar-benar mempelajari tentang e-Planning, e-Budgeting, e-Controlling, dan E-Monitoring. Ia berharap, semua pembiayaan yang berasal dari dana desa harus jatuh di pos yang tepat karena di masa-masa lalu sangat rawan mendapatkan kritikan.

Menyikapi perkembangan jumlah dana desa yang diterima oleh Pemkab Magelang dari tahun ke tahun semakin meningkat, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kajari Kabupaten Magelang dan jajarannya yang telah berkenan memberikan sosialisasi tersebut dalam rangka mengawal dana desa.

Menurut Zaenal, aplikasi tersebut sangatlah penting mengingat background yang ada di jajaran pemerintah desa berbeda-beda, aplikasi jaga dan kawal dana desa ini sudah digunakan kurang lebih oleh 7.000 desa di seluruh Indonesia.

"Latar belakangnya ada yang sudah berangkat dari background pemerintahan, ada yang berangkat dari perdagangan dan industri kecil," pungkasnya. (Bag)-o

## Unnes Laksanakan UTBK Calon Mahasiswa

**SEMARANG (KR)** - Universitas Negeri Semarang (Unnes) siap menyelenggarakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk syarat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 bagi sekitar 10.632 calon mahasiswa yang mendaftar melaksanakan UTBK di Unnes 5 sampai 14 Juli 2020. Wakil Rektor I Unnes Prof Dr Zaenuri Msi didampingi Ketua Pelaksanaan UTBK Unnes yang juga Kepala BAKK Unnes Deddy Rustiono SE Msi dan Ketua Satgas Covid Unnes Dr dr Yuni Wijayanti Mkes kepada pers di kampus setempat, Jumat (3/7) menyatakan UTBK dilaksanakan di kampus Unnes Sekaran dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Di antaranya peserta wajib cuci tangan sebelum masuk ruangan, memakai masker, diukur suhu badannya, membawa handsanitizer pribadi dan lain sebagainya.

"Peserta UTBK Unnes 10.632 orang, yang sudah cetak kartu per 1 Juli 2020 sebanyak 9.584 (90,14 persen). Tahun ini Unnes menerima total mahasiswa baru 8.470 terdiri dari jalur SNMPTN 2.194, jalur SBMPTN 3.654 dan Seleksi Mandiri 2.629. Prodi dengan pendaftar terbanyak di Unnes di antaranya Manajemen (peminat 2.542), Ilmu Hukum (peminat 2.236), PGSD (peminat 1.878), Kesehatan Masyarakat (1.771) dan Psikologi (1.737)," ujar Prof Zaenuri. Terkait protokol pencegahan Covid-19, Prof Zaenuri mengatakan Unnes dalam melaksanakan UTBK sudah memperoleh izin dari Walikota Semarang dan dari Dinas Kesehatan Semarang. Selain menerjunkan ratusan pengawas ujian, juga mengerahkan puluhan tenaga medis yang mengawasi dan mengatur pelaksanaan UTBK terutama terkait dengan protokol kesehatan. (Sgi)-o

## Undip Resmikan Jembatan Sikatak

**SEMARANG (KR)** - Universitas Diponegoro (Undip) memiliki tempat ikonik bangunan baru di dalam kampus yang cukup bagus dan instagrammable.

Yaitu jembatan Sikatak yang berada di dalam kampus Undip dan sebagai salah satu jalur utama menuju Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND). Jembatan juga menghubungkan jalan lingkar Undip yang terputus oleh Sungai Krengseng.

Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum, Jumat (3/7) meresmikan jembatan yang dibangun dengan dana RKAT Undip tahun anggaran 2019-2020, selain APBN Rp 22,2 miliar.

Jembatan yang dikerjakan selama 10 bulan ini dikerjakan bersama jembatan di Tol Batang na-

mun lebih kecil.

"Saat jembatan tol Batang diresmikan, kami masih mengerjakan jembatan Sikatak ini dan kami merasa agak kaget karena ada kemiripan. Namun rancangan jembatan ini sudah kami buat tahun 2015-2016 lalu," ujar Pejabat Pembuat Komitmen Ir Baskoro Rohadi MT saat melapor pada Rektor, Sekretaris Majelis Wali Amanah Prof Esmi Warasih, Ketua Senat Akademik Prof Soenarso dan para pimpinan Undip lainnya yang menghadiri peresmian.

Pada kesempatan peresmian, Undip juga memberikan bantuan kepada mahasiswa terdampak pandemi saat ini. Bantuan berupa sejumlah uang tunai tersebut diinisiasi oleh Gerakan Undip Peduli (GUP).

Adapun spesifikasi jembatan rangka baja tipe Truss Arch Bridge dengan bentang 60 meter dan lebar 11 m (termasuk lebar trotoar pada sisi kanan dan kiri jem-

batan 1,5 m). Konfigurasi jalur pada jembatan ini adalah 2 lajur dua arah tak terbagi (2/2 UD) dengan masing-masing lebar lajur 3,5 m. (Sgi)-o



KR-Sugeng Irianto

**Rektor bersama paea pejabat dan sivitas Undip berpose di jembatan Sikatak.**